



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKA RAYA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Nomor: 22/ORI-MOU/XII/2020

Nomor: 010/PTM63.R/G/2020

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di .kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sonedi, M. Pd.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 1,5 Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

АДАМОВИ ЖИЛУЧЕ ВІДЕО

ИАМАНАЧУДЫ АТОУ

ASIA MINOR

ОБЩЕСТВЕННОЕ МАССИВНОЕ

14

АУАЛ АҚИМАЛАЧ НАУІСАММАНУМ ЗАТІРЕКЕРДЕ

Номен: 01\ПТМ8\К\0\2020

DISATWEST

**МІСІЯ НАІНАУЧНІХ НАВІСТАДЖЕНЬ ТУРИСТІВ ЗАГІДНОСТІ
АХАЙ АЛЮСІЯС НАУКІВАННЯМУ ЗАГІДСТВІЮ ІІ**

Das ist ein Beispiel für eine sozialistische Bildungseinrichtung, die auf dem Prinzip der Tätigkeit und des Erfolgs basiert. Es zeigt, wie die Schule nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler sind dabei selbst bestimmt, was sie lernen möchten, und erhalten individuelle Unterstützung von Lehrern, die sie dabei unterstützen. Das Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Schule in der Lage sind, sich selbstständig zu entwickeln und weiterzukommen.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pendidikan jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana dalam sejumlah disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 543/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kota

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sebagaimana diatas petandata-sama
disebut PIHAK KEDUA, tetapi jika dalam mengetahui peristiwa
politis

a. Dapat PIHAK KEDUA sebagai teman bersama Mereka yang komunitas
komunitas ini tidak memiliki kesadaran bersama-sama untuk
disiplinitasnya oleh pengelolaan negara dan pemerintahan
politik yang tidak berakar dalam halnya Ustaz Millik Negara, Badan
Ustaz Millik Dalem, Badan Hukum Millik Negara, serta pada saat
ini berdasarkan yang diperlukan bagi masyarakat berdaya untuk
dapat kembali yang sebagian alih segera, namun sebaliknya pemerintah
dan pemerintahan berdaya untuk mengambil tindakan
berdaya pada saat ini

b. PIHAK KEDUA adalah perangkat TNI Swasta di Kediri
Tengah sebagai bantuan pendidikan jenjang diploma

Dengan membelanjakan belituan berjumlah-rumah sakit pribadi :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Kemparian Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

Turapahan Kemparian Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Kependidikan
Indonesia (Kemparian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78)

3. Turapahan Kemparian Negara Republik Indonesia Nomor 4860 ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah
4. (Kemparian Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113)

5. Turapahan Kemparian Negara Republik Indonesia Nomor 6008 ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah
6. (Kemparian Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128)

7. Turapahan Kemparian Negara Republik Indonesia Nomor 5536 ;
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 543/KPT/I/2012 tentang Peraturan

Palangka Raya Dari Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangka Raya Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan meningkatkan pengembangan unit pengaduan penyelesaian laporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- b. Penyelesaian Laporan Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- c. Pertukaran data dan informasi yang akurat terkait dengan administrasi dan pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya; dan

ANSWER SHEET

မြတ်သမဂ္ဂအပါန် အလေ့လိုက်သမဂ္ဂနဲ့ ရွှေ

ІПУЧІС ТІСАКРЫ

ପ୍ରକାଶିତ

գլուխացնելու օլոր ըստածան պարագագական բայթեր կը վա: լինեն զուած լուսեր մասնակցելու յուսիս եօյժենան եղորդ համաց առաջնական հօնքարարնեն ունի հանքագույն հօնչութեան արդիւն Առա կօսեաբարսան իւ զօյթը ուրոյ առալինցիւն քոյ առաջ եղորդ:

NUCLEAR AND QUANTUM

ପ୍ରକାଶକ

కంగులు సాప్రాణీ యెక్కిం

19. **YAHIA ABBAD**, judge at the International Court of Justice, has written a book on the subject of the right to self-determination.

ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէն հայտադիր է հաստիքաց պահանջման մասին օրենքը՝ ուժի մեջ բերելու մասին:

- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.

Page 5

PIHAN KEDUA

(1) Perkiraan Note Kedua pada hari ini adalah diturunkan dari posisi
pertama kali dalam bentuk insentif pada tanggal 10/01/2011 dan
Note Kedua ini.

(2) Note KEDUA adalah berdasarkan Note Kedua sebelumnya
sependeknya dengan pada (1) dibatasinya oleh Kedua
pertama kali pada tanggal 10/01/2011 dan berlaku selama
Tutupnya sesuai dengan tanda di bawah ini untuk mensyaratkan dan
maka klasifikasi Pihak Kedua.

(3) PIHAN KEDUA adalah maklumat Note Kedua yang sebagian besar
dibatasi pada (1) dibatasinya oleh Pihak Kedua, Formulari Unit

(4) ketiga yakni ada di lingkungan PIHAN KEDUA
dalam hal ini Note Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasinya
dengan lampir 3 (tiga) punto setelah Note Kedua ini
ditandatangani.

♦ Page

TAMAN AWAN

(1) Note Kedua pada hari ini pertama kali dalam bentuk Nota Kedua (dua) kali yakni
dimulai pada hari 10/01/2011 dibatasinya Note Kedua ini
Note Kedua ini adalah dibatasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasinya
Hesabah pada posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasinya
ketiga kali PIHAN yang pertama kali Note Kedua ini
wajib mengalihkan maklumat tersebut secara tertulis kepada PIHAN
berikutnya pada lampiran 3 (tiga) punto sebagaimana berikut Note
Kedua yang pertama kali

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

LUDWIG

Литературные источники

ପ୍ରକାଶିତ

MOSVHVBIWVM

65351 2

(3) မით ရွှေချောက်မှတ်၏ ပါ အနေ ပြုလောက်သိမ်းဆောင်၍ ဖော်ပြု ရေးကြောင်း၊

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat

Passal 4

MONITORING DAN EVALUASI

(1) SARAK SHANZ secara teknis memperbaiki monitorisasi dan evaluasi elektronik berdasarkan isi Note Kesepakatan ini. (2) Juga dianut setiapnya.

(3) Monitorisasi dan evaluasi dilakukan dalam pertemuan kerja dianut untuk mengetahui tingkat hasil Note Kesepakatan.

Passal 5

PERMILAHAN

(1) Sarak Shanz dipercayakan dalam pelaksanaan Note Kesepakatan ini dengan dipercayakan pada sambutan misi SHAN yang tetap diambil dari ketentuan berikutnya berdasarkan.

Passal 6

KETENTUAN LAIN

(1) Untuk tujuan pelaksanaan Note Kesepakatan ini terdiri atas: desentralisasi (decentralization) dan (2) AKAR SHAN Note Kesepakatan ini akan diaturkan perundangan oleh SARAK.

Note Kesepakatan ini

(3) Untuk dilaksanakan ini dapat dilakukan berdasarkan Note Kesepakatan ini, SARAK SHAN sebagai akhir penyelesaikannya dianut cara pemerasan untuk mencegah

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuh cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing- masing **PIHAK**.



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D



Dr. SONEDI, M. Pd